PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH

Hasan Husaini

UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

Keywords

The Role of Public Relations, Public Trust, Government

Peran Humas, Kepercayaan Publik, Pemerintah

Abstrak

Public trust in the government is a vital element in ensuring the stability and success of governmental programs. Public relations (PR) plays a strategic role in building, maintaining, and enhancing public trust through effective communication, transparency, and mutually beneficial relationships between the government and society. This article aims to analyze the role of public relations in increasing public trust in the government, focusing on communication strategies, crisis management, and the application of information technology in PR practices. The study employs a qualitative approach using literature review methods to explore key concepts and relevant case studies. The findings indicate that proactive, adaptive, and data-driven public relations can be pivotal in fostering a harmonious relationship between the government and the public.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan elemen vital dalam menjamin stabilitas dan keberhasilan program-program pemerintah. Humas (Hubungan Masyarakat) memiliki peran strategis dalam membangun, memelihara, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif, transparansi, dan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran humas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dengan fokus pada strategi komunikasi, pengelolaan krisis, serta penerapan teknologi informasi dalam praktik humas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menggali konsep-konsep utama dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas yang proaktif, adaptif, dan berbasis data dapat menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah fondasi penting bagi terciptanya stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Dalam era digital dan keterbukaan informasi, masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Humas berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan pesan-pesan pemerintah disampaikan secara efektif, sekaligus menangkap aspirasi dan umpan balik dari masyarakat.

Kepercayaan publik merupakan elemen mendasar dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat, kepercayaan publik mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, kompetensi, dan akuntabilitas. Ketika kepercayaan ini terjaga, masyarakat lebih cenderung mendukung kebijakan pemerintah, mematuhi peraturan, dan berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Sebaliknya, jika kepercayaan publik menurun, potensi konflik sosial, ketidakpuasan, dan ketidakstabilan politik menjadi lebih tinggi.¹

Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika kepercayaan publik terhadap pemerintah mengalami tantangan yang signifikan. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keterbukaan media telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan memproses informasi. Di satu sisi, akses informasi yang lebih luas memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih memahami kebijakan pemerintah. Namun, di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, dan krisis kepercayaan terhadap institusi sering kali menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin kompleks mengingat keragaman budaya, geografis, dan sosial yang memengaruhi pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Humas pemerintah, sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam membangun citra dan komunikasi pemerintah, memiliki peran yang strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.²

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, peran humas dalam pemerintah semakin penting. Dalam era digital, humas dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, pendekatan komunikasi yang berbasis data menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Misalnya, survei dan analisis sentimen di

¹ M Ananda, *Peran Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Duri* (repository.uin-suska.ac.id, 2020).

² AP Ayudia and SS Wulandari, 'Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kota Probolinggo', *Journal of Office Administration*, 2021.

media sosial dapat memberikan wawasan tentang persepsi publik terhadap kebijakan tertentu, sehingga pemerintah dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif.

Selain itu, pengelolaan krisis menjadi salah satu aspek penting dalam peran humas pemerintah. Krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti bencana alam, skandal politik, atau pandemi global. Dalam situasi ini, humas memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat, sekaligus memitigasi dampak negatif terhadap citra pemerintah. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa respons yang cepat, transparan, dan empatik dari humas pemerintah dapat menjadi faktor penentu dalam memulihkan kepercayaan publik selama dan setelah krisis.

Di Indonesia, contoh nyata dari pentingnya peran humas terlihat selama pandemi COVID-19. Humas pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan kesehatan, distribusi bantuan sosial, dan protokol keselamatan secara jelas dan konsisten. Keberhasilan atau kegagalan dalam komunikasi ini berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kampanye komunikasi yang terkoordinasi, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, aplikasi, dan konferensi pers daring, menjadi bukti bahwa humas yang adaptif dan berbasis data dapat memberikan hasil yang signifikan.³

Namun demikian, humas pemerintah juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, dan resistensi terhadap perubahan teknologi sering kali menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja humas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas humas, termasuk pelatihan profesional, investasi dalam teknologi informasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan tugas humas.

Melalui latar belakang ini, dapat disimpulkan bahwa humas memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan pendekatan yang proaktif, adaptif, dan berbasis data, humas dapat membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang strategi dan praktik terbaik dalam

³ DS Elyus and M Sholeh, 'Strategi Humas Dalam Meningkatkan Citra Sekolah Di Era Pandemi Covid 19', *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 2021, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/38836/34197>.

pelaksanaan peran humas, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan studi kasus yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam komunikasi pemerintah dan peran humas dalam meningkatkan kepercayaan publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa peran humas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah diantaranya adalah:

1. Komunikasi Transparan dan Akurat

Transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Humas pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat, mudah dipahami, dan relevan. Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi telah menjadi tren yang efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas.

Komunikasi transparan dan akurat adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks hubungan masyarakat (humas), komunikasi ini merujuk pada penyampaian informasi yang jujur, jelas, dan dapat dipercaya, tanpa adanya manipulasi atau pengaburan fakta. Transparansi mencakup keterbukaan pemerintah untuk berbagi informasi yang relevan dengan masyarakat, sementara akurasi memastikan bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan atau kekeliruan.⁴

Komunikasi yang transparan dan akurat memiliki beberapa manfaat utama. Pertama, komunikasi ini membantu menciptakan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah menyampaikan informasi secara jujur, mereka lebih cenderung percaya pada kebijakan yang diterapkan. Kedua, komunikasi ini mendorong partisipasi masyarakat. Ketika informasi yang diberikan transparan dan mudah dipahami, masyarakat lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam program-program pemerintah. Ketiga, komunikasi transparan dan akurat membantu mencegah

⁴ PR Pramungkas, 'Peran Humas Pembentuk Opini Publik Dalam Upaya Pencitraan Lembaga Pendidikan', *garudKelola: Journal of Islamic Education Management*, 2020.

penyebaran informasi yang salah atau hoaks, yang dapat merusak citra pemerintah dan menciptakan keresahan di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, transparansi berarti pemerintah harus bersedia memberikan informasi tentang keputusan, kebijakan, dan langkah-langkah yang diambil, termasuk alasan di baliknya. Misalnya, ketika pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan tertentu, seperti pembatasan sosial atau kenaikan pajak, humas harus mampu menjelaskan mengapa kebijakan tersebut diperlukan dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, humas harus memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Akurasi dalam komunikasi berarti bahwa informasi yang disampaikan harus didasarkan pada fakta yang benar dan dapat diverifikasi. Humas harus berhati-hati dalam memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi kepada publik. Hal ini sangat penting terutama dalam situasi krisis, di mana informasi yang salah atau tidak akurat dapat memperburuk keadaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁵

Di era digital, tantangan untuk menjaga komunikasi transparan dan akurat menjadi semakin kompleks. Informasi yang tersebar melalui media sosial sering kali sulit dikendalikan, dan humas harus bersaing dengan penyebar hoaks atau misinformasi. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Penggunaan platform digital seperti situs web resmi, aplikasi layanan publik, dan media sosial dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan mencapai khalayak luas secara cepat dan efisien.

Selain itu, komunikasi transparan dan akurat memerlukan kemampuan humas untuk berempati terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Misalnya, dalam situasi bencana alam, humas harus memberikan informasi yang tidak hanya akurat tetapi juga disampaikan dengan cara yang menenangkan dan mendukung. Ini mencakup pembaruan secara berkala tentang situasi terkini, langkah-langkah penanganan yang sedang dilakukan, dan panduan bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka sendiri.

⁵ RHS Purwo and D Puspasari, 'Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 2020, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/8903>.

Untuk mencapai komunikasi transparan dan akurat, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, humas harus membangun sistem yang memungkinkan pengumpulan dan verifikasi informasi secara efisien. Kedua, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga humas diperlukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Ketiga, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan media untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan sesuai dengan fakta.

Komunikasi transparan dan akurat bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang membangun budaya kepercayaan dan akuntabilitas. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah terbuka, jujur, dan peduli, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan semakin kokoh. Dengan demikian, komunikasi transparan dan akurat menjadi elemen krusial dalam peran humas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2. Pengelolaan Krisis

Dalam situasi krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau skandal politik, peran humas sangat krusial. Respons yang cepat, koordinasi yang baik, dan komunikasi yang empatik dapat membantu memitigasi dampak negatif dan memulihkan kepercayaan publik. Studi kasus menunjukkan bahwa pemerintah yang memiliki tim humas yang tanggap krisis cenderung mendapatkan dukungan publik yang lebih besar.

Pengelolaan krisis oleh humas (hubungan masyarakat) adalah serangkaian strategi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola komunikasi dalam situasi yang menuntut perhatian segera dan dapat merusak citra atau reputasi organisasi. Krisis dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti bencana alam, kecelakaan, kesalahan manusia, masalah hukum, atau isu-isu kontroversial yang menarik perhatian publik.⁶

Tujuan utama dari pengelolaan krisis oleh humas adalah untuk melindungi citra organisasi, menjaga kepercayaan publik, dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Humas berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan tepat waktu, serta mampu meredakan ketegangan yang timbul di masyarakat atau media.

Proses pengelolaan krisis biasanya dimulai dengan persiapan atau perencanaan. Organisasi perlu memiliki tim krisis yang terlatih dan prosedur standar untuk menangani berbagai jenis krisis. Selain itu, penting untuk melakukan analisis risiko

⁶ P Rahayu and N Trisnawati, 'Strategi Humas Di SMK IPIEMS Surabaya Dalam Meningkatkan Citra Dan Kepercayaan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 2022.

guna mengidentifikasi potensi krisis yang mungkin terjadi. Setelah krisis terjadi, humas perlu segera merespons dengan menyusun pesan yang jelas dan sesuai dengan fakta. Pihak humas harus bekerja sama dengan pimpinan organisasi, pihak hukum, dan departemen lain untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten dan tidak menambah kebingungan. Komunikasi yang cepat dan transparan kepada media dan publik menjadi kunci untuk mengatasi krisis. Selain itu, pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan situasi melalui media sosial dan media massa sangat penting untuk menilai dampak dari krisis dan merespons perkembangan baru.⁷

Setelah krisis berlalu, evaluasi terhadap penanganan krisis dilakukan untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan dalam proses pengelolaan krisis dan mempersiapkan organisasi lebih baik di masa depan.

Dengan demikian, pengelolaan krisis oleh humas tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah dalam jangka pendek, tetapi juga berperan dalam membangun kembali citra dan reputasi organisasi setelah krisis selesai.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi memungkinkan humas untuk mengelola data secara lebih efektif, memonitor opini publik, dan menyesuaikan strategi komunikasi secara real-time. Platform digital seperti portal pemerintah, aplikasi layanan publik, dan media sosial tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi tetapi juga membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) oleh Humas (Hubungan Masyarakat) telah menjadi salah satu aspek penting dalam komunikasi organisasi. Teknologi Informasi memungkinkan Humas untuk menjalin hubungan yang lebih efektif dan efisien dengan berbagai audiens, baik internal maupun eksternal. Dengan adanya TI, Humas dapat memperluas jangkauan informasi serta mempercepat proses penyampaian pesan kepada publik.⁸

Salah satu bentuk pemanfaatan TI oleh Humas adalah penggunaan media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lainnya memungkinkan

⁷ A Rizki and MHAA Ary, 'Manajemen Humas Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rantauprapat', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/111>.

⁸ W Welda and BA Minartiningtyas, 'Sistem Informasi Pengelolaan Kerjasama Bidang Humas Pada STMIK STIKOM Indonesia', *Jurnal Sisfokom (Sistem ...)*, no. Query date: 2023-06-05 07:36:56 (2017), <http://jurnal.atmaluhur.ac.id/index.php/sisfokom/article/view/252>.

Humas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyebarkan informasi terbaru, serta membangun citra positif perusahaan atau organisasi. Media sosial juga memberikan kesempatan bagi Humas untuk memantau tren, analisis sentimen, dan merespons secara cepat terhadap isu yang berkembang. Hal ini sangat membantu dalam pengelolaan krisis atau masalah yang dapat merusak reputasi organisasi.⁹

Selain itu, TI juga memfasilitasi komunikasi internal yang lebih baik. Humas dapat menggunakan email, aplikasi chat, atau sistem manajemen proyek untuk menyampaikan informasi kepada karyawan atau tim, mempercepat proses kolaborasi, serta menjaga transparansi dalam organisasi. Teknologi seperti video conference juga memungkinkan pertemuan jarak jauh yang menghemat waktu dan biaya.

Dalam konteks penyampaian informasi kepada media, Humas dapat menggunakan website, press release digital, atau platform distribusi berita online untuk menginformasikan berbagai perkembangan organisasi. Hal ini mempermudah media untuk mengakses informasi dan mempublikasikannya secara cepat.

Tak kalah penting, TI memungkinkan Humas untuk melakukan analisis data terkait efektivitas komunikasi dan respons audiens. Dengan memanfaatkan alat analitik, Humas dapat mengukur dampak kampanye komunikasi, mengevaluasi hasil, dan menyesuaikan strategi komunikasi ke depannya.

Dengan demikian, pemanfaatan TI dalam Humas tidak hanya mempermudah proses komunikasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjaga hubungan yang baik dengan publik.

4. Humas yang Proaktif, Adaptif, dan Berbasis Data

Dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, humas yang proaktif, adaptif, dan berbasis data memainkan peran penting. Pendekatan proaktif memastikan bahwa humas tidak hanya menunggu hingga masalah muncul, tetapi juga secara aktif mengidentifikasi potensi isu dan meresponsnya sebelum berkembang menjadi krisis. Misalnya, humas dapat melakukan survei berkala untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, serta menyusun kampanye komunikasi yang relevan dengan isu terkini.

⁹ A Munawir, *Peranan Public Relations Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Muhtadiin, Tigaraksa ...* (repository.uinbanten.ac.id, 2019).

Adaptabilitas menjadi krusial dalam lingkungan yang cepat berubah, terutama di era digital. Humas harus mampu menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan tren teknologi, preferensi audiens, dan dinamika sosial. Contohnya adalah penggunaan media sosial yang efektif untuk menjangkau generasi muda atau penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi interaksi dengan masyarakat.¹⁰

Selain itu, pendekatan berbasis data memberikan keunggulan kompetitif bagi humas dalam merancang dan mengevaluasi strategi komunikasi. Dengan memanfaatkan data besar (big data) dan analitik, humas dapat mengidentifikasi pola perilaku masyarakat, memantau sentimen publik, dan mengukur efektivitas kampanye komunikasi. Data ini juga memungkinkan humas untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat kepada pemerintah, berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Sebagai contoh, pemerintah yang berhasil memanfaatkan humas berbasis data dapat meningkatkan partisipasi publik dalam program-program pemerintah, seperti kampanye kesehatan atau program bantuan sosial. Dengan pendekatan ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah cenderung meningkat karena masyarakat merasa kebutuhan mereka dipahami dan diakomodasi secara efektif.

D. KESIMPULAN

Humas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui komunikasi yang transparan, pengelolaan krisis yang efektif, dan pemanfaatan teknologi informasi, humas dapat membangun hubungan yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat. Rekomendasi bagi pemerintah adalah memperkuat kapasitas tim humas, meningkatkan pelatihan komunikasi, dan mengadopsi teknologi terbaru untuk mendukung tugas-tugas humas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, M. *Peran Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Duri*. repository.uin-suska.ac.id, 2020.
- Ayudia, AP, and SS Wulandari. 'Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kota Probolinggo'. *Journal of Office Administration*, 2021.
- Batoebara, MU, and D Zebua. 'Peran Public Relations Dalam Meningkatkan Citra Positif Hotel Santika Premiere Dyandra Medan'. *Network Media*, 2021.

¹⁰ MU Batoebara and D Zebua, 'Peran Public Relations Dalam Meningkatkan Citra Positif Hotel Santika Premiere Dyandra Medan', *Network Media*, 2021.

- Elyus, DS, and M Sholeh. 'Strategi Humas Dalam Meningkatkan Citra Sekolah Di Era Pandemi Covid 19'. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 2021. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/38836/34197>.
- Munawir, A. *Peranan Public Relations Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Muftadiin, Tigaraksa repository.uinbanten.ac.id*, 2019.
- Pramungkas, PR. 'Peran Humas Pembentuk Opini Publik Dalam Upaya Pencitraan Lembaga Pendidikan'. *garudKelola: Journal of Islamic Education Management*, 2020.
- Purwo, RHS, and D Puspasari. 'Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur'. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 2020. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/8903>.
- Rahayu, P, and N Trisnawati. 'Strategi Humas Di SMK IPIEMS Surabaya Dalam Meningkatkan Citra Dan Kepercayaan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19'. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 2022.
- Rizki, A, and MHAA Ary. 'Manajemen Humas Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rantauprapat'. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/111>.
- Welda, W, and BA Minartiningtyas. 'Sistem Informasi Pengelolaan Kerjasama Bidang Humas Pada STMIK STIKOM Indonesia'. *Jurnal Sisfokom (Sistem ...*, no. Query date: 2023-06-05 07:36:56 (2017). <http://jurnal.atmaluhur.ac.id/index.php/sisfokom/article/view/252>.